



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**NOMOR 3 TAHUN 2007**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**TAHUN ANGGARAN 2007**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**BUPATI BULUNGAN,**

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran 2007, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggaran DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 15 Tahun 2000 seri D Nomor 15);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2004 Seri E Nomor 2);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 3 Tahun 2004 Seri E Nomor 3);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2007 Seri A Nomor 1).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 903/8945/296-V/Keu tanggal 25 Oktober 2007 Tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 dan Rancangan Peraturan Bupati Bulungan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
  2. Keputusan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 17/DPRD/2007 Tanggal 9 Oktober 2007 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
  3. Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Bulungan Nomor 7/DPRD/PIMP./2007 Tanggal 1 Nopember 2007 tentang Penyempurnaan Raperda Kabupaten Bulungan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.
  4. Risalah-risalah Sidang DPRD Kabupaten Bulungan tentang Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007.

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN**  
**dan**  
**BUPATI BULUNGAN**  
**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, semula berjumlah **Rp.1.083.917.704.257,16** bertambah sejumlah **Rp.150.256.517.771,17** sehingga menjadi **Rp.1.234.174.222.028,33** dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah :
  - a. Semula **Rp.601.985.734.000,00**
  - b. Bertambah **Rp. 95.874.176.332,00**
  - Jumlah Pendapatan setelah perubahan **Rp. 697.859.910.332,00**
2. Belanja :
  - a. Semula **Rp.1.083.917.704.257,16**
  - b. Bertambah **Rp. 150.256.517.771,17**
  - Jumlah Belanja setelah perubahan **Rp.1.234.174.222.028,33**
  - Defisit setelah perubahan **Rp. 536.314.311.696,33**
3. Pembiayaan :
  - a. Penerimaan
    - 1) Semula **Rp. 496.931.970.257,16**
    - 2) Bertambah **Rp. 64.382.341.439,17**
    - Jumlah Penerimaan setelah perubahan **Rp. 561.314.311.696,33**
  - b. Pengeluaran
    - 1) Semula **Rp. 15.000.000.000,00**
    - 2) Bertambah **Rp. 10.000.000.000,00**
    - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan **Rp. 25.000.000.000,00**

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan **Rp. 536.314.311.696,33**

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan **Rp. -**

**Pasal 2**

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
  - a. Pendapatan Asli Daerah
    - 1) Semula **Rp.22.846.413.000,00**
    - 2) Bertambah **Rp.12.678.749.562,00**
    - Jumlah Pendapatan asli daerah setelah perubahan **Rp. 35.525.162.562,00**

- b. Dana Perimbangan sejumlah
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula                                 | <b>Rp.477.995.000.000,00</b>  |
| 2) Bertambah                              | <b>Rp. 34.750.148.000,00</b>  |
| Jumlah Dana perimbangan setelah perubahan | <b>Rp. 512.745.148.000,00</b> |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula   | <b>Rp.101.144.321.000,00</b>  |
| 2) Bertambah  | <b>Rp. 48.445.278.770,00</b>  |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | <b>Rp. 149.589.599.770,00</b> |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. Pajak Daerah :
- |                                       |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                             | <b>Rp.1.711.600.000,00</b>  |
| 2) Bertambah / (berkurang)            | <b>Rp. -</b>                |
| Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan | <b>Rp. 1.711.600.000,00</b> |
- b. Retribusi Daerah :
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1) Semula                                 | <b>Rp.9.521.593.000,00</b>  |
| 2) Bertambah                              | <b>Rp.2.642.228.000,80</b>  |
| Jumlah Retribusi daerah setelah perubahan | <b>Rp.12.163.821.000,80</b> |
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | <b>Rp.6.000.000.000,00</b>  |
| 2) Bertambah / (berkurang)   | <b>Rp. -</b>                |
| Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | <b>Rp. 6.000.000.000,00</b> |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula  | <b>Rp. 5.613.220.000,00</b> |
| 2) Bertambah   | <b>Rp.10.036.521.561,20</b> |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan | <b>Rp.15.649.741.561,20</b> |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil :
- |  |                               |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula                                | <b>Rp. 264.350.000.000,00</b> |
| 2) Bertambah                             | <b>Rp. 32.750.675.000,00</b>  |
| Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan | <b>Rp.297.100.675.000,00</b>  |
- b. Dana Alokasi Umum :
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                  | <b>Rp.204.324.000.000,00</b> |
| 2) Bertambah / (berkurang)                 | <b>Rp. -</b>                 |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | <b>Rp.204.324.000.000,00</b> |
- c. Dana Alokasi Khusus :
- |  |                              |
|--|------------------------------|
| 1) Semula                                    | <b>Rp. 9.321.000.000,00</b>  |
| 2) Bertambah                                 | <b>Rp. 1.999.473.000,00</b>  |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | <b>Rp. 11.320.473.000,00</b> |

- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah :
- |                                |            |   |
|--------------------------------|------------|---|
| 1) Semula                      | Rp.        | - |
| 2) Bertambah / (berkurang)     | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah Hibah setelah perubahan | Rp.        | - |
- b. Dana darurat :
- |                                       |            |   |
|---------------------------------------|------------|---|
| 1) Semula                             | Rp.        | - |
| 2) Bertambah / (berkurang)            | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah Dana darurat setelah perubahan | Rp.        | - |
- c. Dana bagi hasil pajak :
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1) Semula                                      | <b>Rp.4.800.000.000,00</b> |
| 2) Bertambah / (berkurang)                     | <u>Rp.</u> -               |
| Jumlah Dana bagi hasil pajak setelah Perubahan | <b>Rp.4.800.000.000,00</b> |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus :
- |  |            |   |
|--|------------|---|
| 1) Semula  | Rp.        | - |
| 2) Bertambah / (berkurang)                                   | <u>Rp.</u> | - |
| Jumlah Dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah perubahan | Rp.        | - |
- e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya :
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1) Semula   | <b>Rp.94.000.000.000,00</b>        |
| 2) Bertambah  | <b><u>Rp.50.789.599.770,00</u></b> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan | <b>Rp.144.789.599.770,00</b>       |

### Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung :
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1) Semula                                       | <b>Rp.215.241.740.075,76</b>       |
| 2) Bertambah                                    | <b><u>Rp. 1.939.296.925,46</u></b> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | <b>Rp. 217.181.037.001,22</b>      |
- b. Belanja Langsung :
- |   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| 1) Semula                                 | <b>Rp. 868.675.964.181,40</b>        |
| 2) Bertambah                              | <b><u>Rp. 148.317.220.845,71</u></b> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | <b>Rp.1.016.993.185.027,11</b>       |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai :
- |  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| 1) Semula                                | <b>Rp.172.695.556.598,76</b>      |
| 2) Berkurang                             | <b><u>Rp 8.224.203.074,54</u></b> |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | <b>Rp.164.471.353.524,22</b>      |

- b. Belanja bunga :
- |  |           |   |
|--|-----------|---|
| 1) Semula                              | Rp.       | - |
| 2) Bertambah / (berkurang)             | <u>Rp</u> | - |
| Jumlah Belanja bunga setelah perubahan | Rp.       | - |
- c. Belanja subsidi :
- |  |           |   |
|--|-----------|---|
| 1) Semula                                | Rp.       | - |
| 2) Bertambah / (berkurang)               | <u>Rp</u> | - |
| Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan | Rp.       | - |
- d. Belanja hibah :
- |  |           |   |
|--|-----------|---|
| 1) Semula                              | Rp.       | - |
| 2) Bertambah / (berkurang)             | <u>Rp</u> | - |
| Jumlah Belanja hibah setelah perubahan | Rp.       | - |
- e. Belanja bantuan sosial :
- |   |                                    |
|---|------------------------------------|
| 1) Semula                                       | <b>Rp. 31.967.712.000,00</b>       |
| 2) Bertambah                                    | <b><u>Rp 10.163.500.000,00</u></b> |
| Jumlah Belanja bantuan sosial setelah perubahan | <b>Rp.42.131.212.000,00</b>        |
- f. Belanja bagi hasil :
- |   |                           |
|---|---------------------------|
| 1) Semula                                   | <b>Rp.578.471.477,00</b>  |
| 2) Bertambah / (berkurang)                  | <b><u>Rp -</u></b>        |
| Jumlah Belanja bagi hasil setelah perubahan | <b>Rp. 578.471.477,00</b> |
- g. Belanja bantuan keuangan :
- |   |                  |   |
|---|------------------|---|
| 1) Semula   | <b>Rp.</b>       | - |
| 2) Bertambah / (berkurang)                        | <b><u>Rp</u></b> | - |
| Jumlah Belanja bantuan keuangan setelah perubahan | <b>Rp.</b>       | - |
- h. Belanja tidak terduga :
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula                                      | <b>Rp.10.000.000.000,00</b> |
| 2) Bertambah / (berkurang)                     | <b><u>Rp -</u></b>          |
| Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan | <b>Rp.10.000.000.000,00</b> |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai :
- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1) Semula                                | <b>Rp.104.274.968.325,30</b>       |
| 2) Bertambah                             | <b><u>Rp. 2.318.879.665,90</u></b> |
| Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan | <b>Rp.106.593.847.991,20</b>       |
- b. Belanja barang dan jasa :
- |  |                                    |
|--|------------------------------------|
| 1) Semula  | <b>Rp.212.456.784.488,79</b>       |
| 2) Bertambah                                     | <b><u>Rp 39.183.422.991,24</u></b> |
| Jumlah Belanja barang dan jasa setelah perubahan | <b>Rp.251.640.207.480,03</b>       |
- c. Belanja modal :
- |  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| 1) Semula                              | <b>Rp.551.944.211.367,31</b>        |
| 2) Bertambah                           | <b><u>Rp.106.814.918.188,57</u></b> |
| Jumlah Belanja modal setelah perubahan | <b>Rp.658.759.129.555,88</b>        |



#### Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan :
    - 1) Semula **Rp.496.931.970.257,16**
    - 2) Bertambah **Rp 64.382.341.439,17**
    - Jumlah Penerimaan setelah perubahan **Rp.561.314.311.696,33**
  - b. Pengeluaran :
    - 1) Semula **Rp.15.000.000.000,00**
    - 2) Bertambah **Rp.10.000.000.000,00**
    - Jumlah Pengeluaran setelah perubahan **Rp. 25.000.000.000,00**
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SiLPA) :
    - 1) Semula **Rp.494.931.970.257,16**
    - 2) Bertambah **Rp 64.382.341.439,17**
    - Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan **Rp. 561.314.311.696,33**
  - b. Pencairan dana cadangan :
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp \_\_\_\_\_.
    - Jumlah Dana cadangan setelah perubahan Rp. -
  - c. Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan :
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp \_\_\_\_\_.
    - Jumlah Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. -
  - d. Penerimaan pinjaman daerah :
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp \_\_\_\_\_.
    - Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan Rp. -
  - e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman :
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp \_\_\_\_\_.
    - Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. -
  - f. Penerimaan piutang daerah :
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp \_\_\_\_\_.
    - Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan Rp. -
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari Jenis Pembiayaan :
- a. Pembentukan dana cadangan :
    - 1) Semula Rp. -
    - 2) Bertambah / (berkurang) Rp \_\_\_\_\_.
    - Jumlah Pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp. -

- b. Penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah :
- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| 1) Semula                           | <b>Rp.15.000.000.000,00</b> |
| 2) Bertambah                        | <b>Rp.10.000.000.000,00</b> |
| Jumlah Penyertaan modal (investasi) |                             |
| Pemerintah daerah setelah perubahan | <b>Rp.25.000.000.000,00</b> |
- c. Pembayaran pokok hutang :
- |                                |     |   |
|--------------------------------|-----|---|
| 1) Semula                      | Rp. | - |
| 2) Bertambah / (berkurang)     | Rp  | - |
| Jumlah Pembayaran pokok hutang |     |   |
| setelah perubahan              | Rp. | - |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah :
- |                                  |     |   |
|----------------------------------|-----|---|
| 1) Semula                        | Rp. | - |
| 2) Bertambah / (berkurang)       | Rp  | - |
| Jumlah Pemberian pinjaman daerah |     |   |
| setelah perubahan                | Rp. | - |

### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja dan pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
7. Lampiran VII Daftar piutang daerah;
8. Lampiran VIII Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
9. Lampiran IX Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
10. Lampiran X Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya;
11. Lampiran XI Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah ;dan
13. Lampiran XIII Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

**Pasal 6**

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Nopember 2007

**BUPATI BULUNGAN,**

**BUDIMAN ARIFIN**

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 1 Nopember 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,**

**KARSIM AL'AMRIE**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2007 NOMOR 5  
SERI A

NO.	NAMA	JABATAN	PARAF
1.	PHILLIPUS, SH	KABAG HUKUM	
2.	IR. H. ABDUL RAUF, MAP	ASISTEN BIDANG PEMERINTAHAN	
3.	DRS. H. KARSIM AL'AMRIE, MSI	SEKRETARIS DAERAH	
4.	DRS. LIET IMGAI, MSI	WAKIL BUPATI	

**BUPATI BULUNGAN,**



**BUDIMAN ARIFIN**